

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pertanyaan penelitian yang ada pada Bab-bab sebelumnya maka untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh dapatlah ditarik beberapa kesimpulan yaitu

1. program Accountability

secara umum dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan telah di dilaksanakan oleh pemerintah Desa gufasa dan Desa matui, Namun pada pelaksanaannya di lapangan belum bisa dikatakan telah berjalan sesuai dengan apa yang kemudian diharapkan, misalnya dari sisi perencanaan dana Desa di Desa Gufasa dan Desa matui sama sekali tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dan khususnya di Desa matui dari sekian banyak perencanaan kegiatan yang dibuat, masih terdapat banyak kegiatan yang belum terealisasi. Sementara dari sisi pelaksanaannya, jika di bandingkan antara kedua Desa ini, pelaksanaan program di Desa gufasa

masih tergolong cukup baik ketimbang Desa matui, salah satu faktor pendukungnya adalah letak Desa gufasa yang berada dipusat perkotaan sehingga lebih mudah melakukan belanja barang dan jasa untuk keperluan di Desa. Sementara di Desa matui karena keterbatasan jalan darat yang belum ada sehingga pelaksanaan kegiatannya belum berjalan secara optimal dan lebih banyak mengeluarkan biaya dalam proses pembangunan di Desa.

## 2. Policy Accountability.

Pilihan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah Desa gufasa dan Desa Matui dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2015 untuk mendanai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa telah berjalan sesuai dengan Skala prioritas penggunaan dana Desa, namun pada penggunaan anggarannya lebih banyak di gunakan untuk Pembangunan fisik, misalnya di Desa gufasa, dana Desa yang diberikan oleh pemerintah Pusat sebesar 257,208,000, kemudian digunakan untuk pembangunan

Desa (*Drainase*) sebesar 196,008,000, sementara di Desa matui, dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat untuk Desa matui sebesar 263,961,000 dari besaran anggaran ini kemudian digunakan untuk pembangunan Desa (Balai pertemuan) sebesar 200,000,000 di tahun 2015.

### 3. Performance Accountability

Dari sisi Capaian kegiatan yang telah di kerjakan oleh pemerintah Desa gufasa dan Desa matui pada tahun 2015 dengan menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN pemerintah pusat bisa dikatakan telah terealisasi, hanya saja di Desa matui pada pelaksanaan kegiatannya dianggap belum sesuai dengan target waktu dan biaya yang telah ditentukan, sebab waktu yang ditentukan oleh pemerintah daerah dalam masa 3 bulan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran dana Desa tahap pertama sudah harus selesai, namun pada kenyataannya di Desa matui belum mencapai target waktu dan biaya yang telah ditetapkan tersebut. Sementara di Desa gufasa,

dalam pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan dana Desa di tahun 2015 telah mencapai target waktu dan biaya yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah Desa.

#### 4. Probity and legality Accountability

Dari sisi kejujuran dan kepatuhan terhadap regulasi, di Desa Gufasa telah mempertanggungjawabkan terkait dengan penggunaan anggaran sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, namun pada pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan tingkat transparansi tentang penggunaan anggaran masih sangatlah minim, disisi lain pada tahun 2015 belum adanya satu regulasi yang baru di daerah yang khususnya berbicara tentang pedoman dalam pengelolaan dana Desa pasca Undang-Undang No 6 tahun 2014 disahkan. sehingga ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa di Desa Gufasa dan Desa matui.

#### 5. Kepemimpinan yang berkemampuan

Secara umum kepemimpinan dari ke dua Desa ini yakni Desa gufasa dan Desa matui pada tahun 2015 kiranya masih memiliki sedikit kemampuan dalam menjalankan tugasnya, hal ini dapat dilihat dari tingkat perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban yang kemudian di serahkan ke pemerintah daerah, namun pada pelaksanaannya di lapangan sama-sama masih memiliki kekurangan dan kelemahan dalam pengelolaan dana Desa. misalnya di Desa matui, pada tahun 2015 karena memiliki keterbatasan SDM sehingga pada pelaksanaan kegiatan khususnya pada pembangunan Desa, diserahkan pada pihak ketiga (Kontraktor) untuk mengelolanya sehingga menimbulkan beberapa permasalahan yang telah terjadi di Desa matui. sementara di Desa gufasa meskipun memiliki keterbatasan SDM, namun pada pelaksanaannya di lapangan telah berjalan sedikit lebih baik jika di bandingkan dengan Desa matui, hanya saja kepemimpinan kepala Desa di Desa gufasa pada tahun

2015 masih terlihat sedikit kaku dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin.

6. Diterima oleh semua pihak.

Secara umum masyarakat di Desa Gufasa dan Desa Matui menerima bentuk dari pilihan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, karena pilihan kebijakan yang diambil berdasarkan kondisi yang memang menjadi suatu keharusan bagi pemerintah Desa untuk membuat kebijakan dengan menggunakan dana Desa di tahun 2015. Hanya saja pada perencanaan awal terkait dengan program yang dibuat oleh pemerintah Desa sama sekali tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, keputusan yang diambil hanya berdasarkan diskusi diinternal pemerintah Desa.

7. Perlu pemahaman masyarakat

Pemahaman masyarakat terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Desa dengan menggunakan Dana Desa ini masih tergolong baik, meskipun pada tahun 2015

tidak ada keterlibatan masyarakat dalam proses awal perencanaan program, namun pada pelaksanaan kegiatannya masyarakat dapat memahami dampak positif dari pilihan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, misalnya di Desa gufasa dengan membuat saluran (*Draianase*) ini masyarakat dapat terhindar dari ancaman banjir sebab Desa gufasa merupakan pusat pengairan air yang mengalir dari Desa tetangga padasaat musim hujan. Sementara di Desa matui dengan dibuatnya balai pertemuan ini masyarakat tidak perlu lagi menggunakan Rumah warga pada saat membuat rapat di Desa,

#### 8. Adaptasi secara terus menerus

Secara umum pemerintah di Desa gufasa dan Desa matui terus berupaya untuk melakukan adaptasi atas perubahan terhadap masyarakat, namun pada kenyataannya pelaksanaan dana Desa di tahun 2015 masih belum berjalan secara maksimal, hal ini disebabkan karena masyarakat secara keseluruhan belum merasakan dampak langsung dari pemberian dana Desa. Disisi lain tahun

2015 merupakan tahap awal pelaksanaan dana Desa, dimana pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap dana Desa, sehingga pelaksanaan dana Desa ditahun 2015 belum berjalan secara efektif.

## **1.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam kesimpulan, juga perlu dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa harusnya mempertimbangkan secara matang dalam melakukan perencanaan program yang akan dikerjakan, disisi lain perlu adanya ketelibatan masyarakat dalam melakukan perencanaan program, sehingga segala keputusan yang diambil berdasarkan atas musyawar dan mufakat bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat yang nantinya akan mendukung pencapaian tujuan dari perencanaan pembangunan di Desa. Sementara dukungan dari pemerintah daerah juga sangat diperlukan mengingat



karena keberadaan Desa matui lebih jauh dari pusat perkotaan dan masih memiliki keterbatasan infastruktur, sehingga pemerintah daerah harusnya lebih fokus terhadap pola pembangunan di Desa khususnya di Desa matui

2. Penggunaan dana Desa tidak seharusnya di fokuskan atau di titik beratkan hanya pada pembangunan Desa (Pembangunan fisik) melainkan dari sisi pemberdayaan masyarakat juga harusnya diprioritaskan oleh pemerintah di Desa gufasa dan Desa matui, olehnya itu pemerintah Desa seharusnya menyediakan sarana pelatihan terhadap masyarakat Desa untuk mengelolah sumber kekayaan yang ada di Desa dan meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat, yang terdiri dari kelompok tani, nelayan, pengrajin, usaha ekonomi dan lain sebagainya untuk menambah pendapatan Desa.
3. Untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan target dan tujuan yang telah di tetapkan, maka kepala Desa matui beserta perangkatnya dalam melakukan suatu kegiatan harusnya lebih meningkatkan konsistensi

terhadap apa yang telah direncanakan, sementara dari sisi lain manajemen waktu dan anggaran juga diperlukan agar kegiatan yang telah di rencanakan bisa mencapai target waktu dan biaya yang telah di tentukan.

4. Perlu kiranya pemerintah Desa menyampaikan secara terbuka terhadap masyarakat terkait dengan penggunaan anggaran baik itu dari sisi pembangunan Desa (fisik) maupun pemberdayaan masyarakat (Non fisik), tujuannya selain untuk meningkatkan taransparansi terhadap dana publik, disisi lain agar tidak adanya kecurigaan dari masyarakat terhadap pemerintah tentang peyalahgunaan keuangan
5. Untuk meningkatkan kapasitas SDM (Pemerintah Desa) yang berkualitas terutama kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan di Desa, maka perlu kiranya pemerintah Daerah menyediakan sarana pelatihan terkait dengan kapasitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana Desa, tujuannya agar penggunaan dana Desa dapat lebih terarah dan tepat pada sasaran.

6. Pembahasan terkait dengan perencanaan program tidak semestinya di lakukan di internal pemerintah saja namun harus dibuka untuk umum, agar masyarakat tahu dan menerima terkait dengan kegiatan yang nantinya akan di jalankan sebab kegiatan yang diambil adalah keputusan bersama, disisi lain keterbukaan anggaran juga diperlukan sehingga dari pihak pemerintah juga akan mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat.
7. Meskipun pada kenyataannya masyarakat dapat memahami terkait dengan dampak dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Desa, namun sudah menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah Desa dalam melakukan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait dengan dampak positif maupun negatif dari kegiatan yang akan di kerjakan serta membuka ruang untuk masyarakat menanggapi. Selain itu pemerintah juga harus mempertimbangkan secara matang terkait dengan program yang akan di jalankan baik itu merupakan usulan dari masyarakat maupun dari pemerintah Desa sendiri.

8. Agar tidak menimbulkan kecemburuan antara masyarakat, maka pemerintah Desa harusnya membuat satu kegiatan yang pada dasarnya masyarakat secara keseluruhan dapat menikmati hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah Desa, oleh sebab itu pemerintah Desa harus lebih jeli dalam melihat perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, baik itu perubahan dalam pola perilaku, maupun perubahan terhadap tingkat kesejahteraan rakyat,